

## **Urgensi Peran Elit Agama dalam Panggung Politik (Analisis Kritis Peran Kiai-kiai Kampung (Masjid) Terhadap Perpolitikan Praktis di Kabupaten Kediri)**

**Untung Khoiruddin**<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Jln. Sunan Ampel 07, Ngronggo, Kota Kediri, Jawa Timur, 64127 Indonesia  
Email: untungkhoiruddin@gmail.com

**Abstrak:** This Research is principally concerned on the issue how “the role of kiai in the political practice in Kediri regency. This research discusses three major issues, namely: (1) the phenomena of kiai in Kediri regency (2) the role of kiai in the political practice in Kediri and (3) this reaseach tries to create the ideal concept to the kiai participation in the political practice. furthermore, this research is arranged based on devotion, interview, and observation directly to the kyai-kyai in the kediri regency. hopefully, this research would like give a contribution to the discussing relating kiai in the political practice in the academic level.

**Kata Kunci:** Kyai, political practice, the role.

## 1. Pendahuluan

Bangsa Indonesia ketika peristiwa adanya Orde Baru dan juga lahirnya reformasi membawa dampak pada perubahan politik. Reformasi merupakan salah satu bagian dari transisi demokrasi yang mencakup liberalisasi politik dan demokratisasi. Dalam tahapan ini terjadi perubahan rezim serta meluasnya hak-hak politik rakyat dan munculnya ledakan partisipasi politik yang ditandai dengan dilaksanakannya pemilu dan pergantian pemerintahan sebagai konsekuensi dari pemilu. Pada situasi seperti ini sebagaimana digambarkan oleh Guilermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter [1] bahwa transisi demokrasi politik sering membuahkan situasi ketidakpastian.

Dalam setiap perubahan sosial yang terjadi (dalam masyarakat muslim Jawa khususnya), sosok kiai selalu menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan. Kiai dalam kehidupan sosial masyarakat bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Kiai mempunyai kekuatan tersendiri dalam struktur sosial budaya masyarakat, bahkan kiai-kiai kampung (masjid) memang mempunyai peran yang sangat penting dalam mengubah peta kehidupan sosial masyarakatnya. Karena hal ini terjadi kiai telah menjadi elite sosial di tengah-tengah masyarakat. Dalam struktur social, kultural kiai dianggap sebagai raja-raja lokal yang mampu menggerakkan kehidupan masyarakat, sehingga tidak berlebihan apabila kiai diposisikan layaknya raja yang disanjung, dihormati dan disegani [2].

Meskipun sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, dalam konteks akademik, istilah "kiai" untuk pertama kalinya diperkenalkan Geertz pada tahun 1960 dalam kerangka studi antropologi untuk mewakili sosok ulama dan kiai [3].

Para kiai menginginkan pemerintah Indonesia yang demokratis agar terselenggaranya kualitas yang baik dengan pemerataan keadilan ekonomi dan

pendidikan. Peran kiai-kiai juga memacu adanya tuntutan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan bangsa Indonesia [4]. Posisi kiai seperti ini tergolong unik, dan menjadi inti dari kualitasnya yang dominan. Walaupun posisi itu seringkali menjadi persoalan dan menyulitkannya, namun justru di sinilah letak keagungan kiai. Kiai adalah pemimpin kreatif yang selalu berupaya mengembangkan masyarakat dalam dimensi-dimensi baru, dan panorama berwajah plural kehidupan masyarakat dewasa ini, merupakan indikasi adanya kreasi jenius kiai.

Ulama lebih memerankan fungsi-fungsi administratif, sedangkan kiai cenderung bermain pada tataran kultural. Maka argumentasi yang semacam ini, kita dapat memahami mengapa perkumpulan formal komunitas pemilik ilmu agama Islam di Indonesia menggunakan istilah "ulama" alih-alih "kiai", yaitu Majelis Ulama Indonesia, dan bukan Majelis Kiai Indonesia [5].

Menurut Endang Turmudi bahwa aspek politik kepemimpinan kiai-kiai kampung (masjid) perlu diperhatikan karena ia mengungkap pola patronase dalam hubungannya dengan masyarakat, dan bagaimana kekuasaannya secara jelas terlihat sentralitas [6]. Otoritas dan kekuasaan kiai dalam masyarakat menimbulkan asumsi bahwa pengaruh kiai tidak terbatas hanya pada hubungan sosial saja, tetapi juga dapat diterapkan dalam bidang politik. Asumsi ini dibuktikan dengan fakta bahwa selama pemilu, misalnya, partai peserta pemilu coba memanfaatkan kiai untuk meningkatkan perolehan suara mereka. Pengaruh kiai ini tentu begitu jelas dikalangan umat Islam yang saleh sering mengikuti langkah politik kiai [7].

Maka untuk itu, bahwa secara tidak langsung kiai-kiai dalam proses sosial politik di Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dan memainkan peran penting di setiap perubahan sosial. Bahwa keterlibatan kiai-kiai kampung (masjid) tidak hanya terbatas dalam perkembangan keagamaan, sosial dan kultural saja, akan

tetapi di luar itu kiai juga ikut terlibat yang intens dalam perkembangan proses politik sejak Indonesia belum merdeka, masa kemerdekaan dan masa reformasi sampai sekarang [8]. Dengan didorong adanya kenyataan bahwa dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara agama dan politik yang menimbulkan sikap kiai melebarkan pengaruhnya dengan memanfaatkan perang secara luas [9].

Pola kepemimpinan kiai adalah sangat bervariasi dan terjadi berbagai pergeseran-pergeseran, serta perubahan-perubahan bahkan menunjukkan keunikannya, karena bukan hanya menunjukkan fase pergeseran dari pola kepemimpinan karismatik ke arah tradisional dan ke rasional, melainkan kepemimpinan kiai dapat merupakan pola-pola yang mengandung dua unsur dominan karismatik-tradisional atau tradisional-rasional [10]. Kualitas dari sistem pendidikan pesantren sangat tergantung pada kualitas pengasuhnya (kiai) sebagai sosial aktor, mediator, dinamisator, katalisator, motivator, maupun sebagai power dengan kedalaman ilmu kiai dan wawasan barunya [11].

Karir politik kiai-kiai kampung (masjid) saat ini bukanlah hal yang baru, keterlibatan kiai dalam permainan politik sudah ada sejak zaman pra-kemerdekaan. Jika pada zaman pra-kemerdekaan mereka meneriakkan kemerdekaan melalui pesantren (pendidikan), masjid dan jamaahnya, lobikultural dan perang melawan penjajahan, maka, pasca kemerdekaan mereka terjun ke dunia politik melalui partai politik. Hal ini dapat dilihat pada pemilu pertama tahun 1955 sampai pemilu terakhir tahun 2004 yang lalu.

Panggung politik nasional selalu diramaikan dengan para kiai yang wira-wiri masuk dalam partai politik. Hal ini dikarenakan, peran kiai memiliki pengikut yang setia seperti fans dalam dunia infotainment. Lebih lanjut, bahwa kharisma kiai selalu dapat menarik simpati kepada masyarakat, karena mereka dianggap orang kharismatik dan doanya selalu makbul (diterima) oleh

Allah Swt [12]. Dari sinilah urgensitas sebuah riset mengenai peran kiai/elit agama Islam dalam panggung politik sangat diperlukan, artinya kiai-kiai kampung (masjid) juga mendapatkan materi-materi politik biar-biar orang Islam terpecah belah. Dengan demikian, kiai-kiai kampung (masjid) akan mendapatkan pengalaman politik sebagai tambahan pengetahuan yang mampu masuk panggung politik.

Perkembangan bangsa Indonesia yang semakin tidak menentu dan juga berat menghadapi tantangan dengan Negara-negara lain. Dan politik semakin berkembang apalagi ketika ada pagelaran politik ini digelar, para ulama dan tokoh agama Kiai [13], ustad, pemimpin ormas keagamaan, penceramah, pimpinan institusi agama, akademisi, dsb) ikut sibuk menjadi "*corong*" atau "*echo*" para politisi dan kandidat atau pasangan calon (paslon) tertentu. Bahkan tidak sedikit para tokoh agama dan ulama yang ikut terjun langsung menjadi "*paslon*" dan "*cawan*" (calon dewan) bersaing dengan tokoh-tokoh dari kubu lain.

Apalagi pasca pemilu serentak di Indonesia umumnya, dan khususnya di Jawa Timur pilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 26 Juni 2018 antara kiai-kiai kampung (masjid) yang tidak menentu mempunyai pilihan yang jelas antara satu dengan lainnya. Oleh karenanya, di kabupaten Kediri sebelum dan sesudahnya banyaknya kiai-kiai kampung (masjid) saling menyalahkan antara satu dengan lainnya, sehingga kiai-kiai yang tidak bisa berpolitik hanya saling ikut-ikutan saja karena tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah. Inilah salah satu pengamalan para kiai-kiai kampung (masjid) yang masuk panggung politik tetapi banyak yang tidak faham politik akhirnya para kiai-kiai mengelompok sendiri-sendiri pada kenyataan masyarakat menilai bahwa kiai-kiai itu sulit dijadikan panutan umat [14].

Dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung, Kiai yang merupakan bagian dari rakyat

mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Mereka mempunyai kemampuan untuk memainkan peran dan pengaruhnya karena mempunyai keunggulan-keunggulan yang melekat pada dirinya, mereka dapat mengelola dan mengendalikan cabang kehidupan tertentu, dimana pada gilirannya yang bersangkutan akan dapat memainkan peran dan pengaruhnya tersebut untuk menentukan corak dan arah bergulirnya roda kehidupan [15].

Maka, fenomena yang semacam ini bahwa dari kelompok kiai-kiai kampung (masjid) ini sudah menjadi *trend* dan "menggurita" pasca rontoknya rezim Orde Baru tahun 1998 yang menandai dibukanya kembali kran demokrasi di Indonesia setelah sekian lama "mati suri". Sejak itulah, lantaran ada peluang dan kesempatan untuk menjadi politisi atau birokrat, banyak para kiai, tokoh agama dan ulama yang kambuh "*syahwat*" politiknya. Sampai saat ini, banyak kiai, tokoh agama dan ulama yang "ereksi" terhadap politik-kekuasaan. Dimana nantinya akan mempunyai perbedaan yang bersifat ideologis, kekuasaan dan kebijakan yang hanya menguntungkan seseorang atau sekelompok orang saja [16]. Dengan kebijakan dan kekuasaan sepertinya adalah merupakan konsekuensi perburuan rente yang dilakukan politisi. Para politisi melihat jabatan-jabatan di eksekutif dan parlemen kerap diprioritaskan sebagai gerbang untuk menjalankan perburuan rente, bukan untuk mewujudkan tujuan politik yang bersifat substantif yakni perjuangan akan kebenaran dan keadilan yang berpihak pada masyarakat.

Tentu saja ada para kiai-kiai kampung (masjid) yang memilih menjadi salah satu calon yang mempunyai harapan, sehingga bisa dikatakan para elit agama menjaga jarak dengan dunia politik-kekuasaan. Kadang-kadang ulama yang lebih memilih mengurus umat, memberdayakan warga, dan menjauhi hingar-bingar dunia politik praktis kekuasaan yang korup. Maka yang paling penting untuk dicatat adalah ulama bukan berarti

tidak berpolitik. Tetapi mereka juga berpolitik tetapi menggunakan mekanisme, cara, strategi, taktik, dan tujuan yang berbeda dengan "ulama politik", yaitu kiai-kiai kampung (masjid) yang secara terang-terangan maupun "malu-malu kucing" terjun di dunia politik praktis. Dengan demikian, maka kiai-kiai kampung (masjid) jangan terjebak politik bebas yang akhirnya merugikan umat (masyarakat).

## 2. Metode

Pengabdian *berbasis* riset komunitas ini yang berjudul Urgensi Peran Elit Agama Dalam Panggung Politik (Analisis Kritis Peran Kiai-kiai Kampung (Masjid) Terhadap Perpolitikan Praktis di Kabupaten Kediri) dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan analisis hasil penelitian dari data-data lapangan yaitu mengadakan observasi dan wawancara kiai-kiai kampung (masjid) yang ada di Kabupaten Kediri sebagai salah satu perwakilan tiap-tiap kecamatan 2 (dua) orang atau responden.

Maka, dengan adanya metode tersebut akan dapat menemukan sebuah jawaban atau alternatif kiai-kiai kampung (masjid) yang mana jawabannya pasti tidak sama, karena memang kiai-kiai mempunyai pendapatnya yang berbeda. Akan tetapi dengan jawaban dan pendapat yang berbeda itu jangan sampai menimbulkan perpecahan antara kiai satu dengan lainnya, karena urgensi kiai sangat diperlukan dalam panggung politik. Disamping itu juga, bahwa kiai-kiai kampung (masjid) mempunyai peran yang sangat penting dalam perpolitikan panggung politik dan mampu menghadapi perselisihan antara kiai satu dengan kiai lainnya supaya tidak terjadi pergeseran dan perpecahan. Maka untuk itu, perlunya pertemuan kiai-kiai pada waktu FGD untuk menemukan jawaban-jawaban yang terkait dengan

perannya kiai-kiai kampung (masjid) sebagai bukti data-data yang valid dan kongkrit.

### 3. Hasil

Gencarnya para kiai-kiai kampung (masjid) menjelang pemilu sering didorong oleh keinginan, ambisi, dan kepentingan tertentu (baik kepentingan politik-ekonomi maupun kepentingan ideologi-keagamaan), mereka juga rela menjadi "*bamper*" dari salah satu paslon. Mereka rela "berkelahi" dan "berperang" (*psywar*) dengan para tokoh agama dan ulama yang mendukung paslon lain. Hal tersebut, berlangsung sejak kelahiran sampai dengan kematian seseorang walaupun dalam hidupnya seseorang itu tidak pernah bersentuhan secara langsung dengan hiruk-pikuk politik yang begitu pelik dan mempengaruhi sistem politik tersebut. Seperti yang diaktakan Aristoteles bahwa politik adalah *master of science* [17]. Dalam hal ini, yang dimaksud bukan dalam konteks arti ilmu pengetahuan (*scientific*) akan tetapi, pengetahuan tentang politik merupakan sebuah kunci utama guna memahami lingkungan sosial sekitarnya. Maka, diperlukanlah pengetahuan kiai-kiai kampung (masjid) tentang panggung politik tetapi bukan demam politik.

Jika ada kiai-kiai kampung (masjid) yang ingin terjun langsung menekuni profesi sebagai politisi dan birokrat juga sah-sah saja. Akan tetapi juga perlu diperdebatkan adalah bukan boleh tidaknya ulama/kiai masuk kekuasaan melainkan mampu dan tidaknya mereka jika ikut berkompetisi di dunia politik kekuasaan yang profan dan korup itu. Di sinilah diperlukan prasyarat berupa kompetensi personal, yakni kualitas individual, integritas moral, dan kemampuan untuk memahami politik dengan baik. Jika para ulama/kiai memiliki kapabilitas untuk memahami dan mengelola politik, kenapa tidak mereka diberi peluang dan

kesempatan untuk ikut bertarung di panggung politik yang bebas artinya siapapun boleh masuk [18].

Tetapi sebaliknya, jika kiai-kiai kampung (masjid) itu hanya bisanya dapat mengimami shalat, mengaji, berkhotbah, mengisi pengajian atau ceramah saja, sementara "nol jumbo" wawasan politik-pemerintahannya. Maka untuk itu, sebaiknya mereka mengambil peran sebagai "penyokong moral," pengayom masyarakat dan penjaga aset kultural saja seperti yang pernah dipraktikkan oleh Walisongo dan para ulama tempo doeloe. Sehingga peran ini akan jauh lebih bermanfaat untuk umat dan masyarakat ketimbang ikut-ikutan terjun ke kancah politik yang justru "menjerumuskan" ulama/kiai itu sendiri karena "watak" kekuasaan yang korup itu. Akibat dari tuntutan atau harapan sangat penting di pegang oleh elit agama dipanggung politik [19].

Maka berkaitan hal tersebut diatas, Urgensi Peran Elit Agama Dalam Panggung Politik (Analisis Kritis Peran Kiai-kiai Kampung (Masjid) Terhadap Perpolitikan Praktis di Kabupaten Kediri) ada keinginan untuk mendorong warga masyarakat untuk menjaga politik praktis agar tidak terlanjur secara bebas.

1. Peran kiai dalam dunia politik tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun hanya sebagai pemimpin informal, kiai adalah orang yang diyakini penduduk mempunyai otoritas yang sangat besar dan kharismatik;
2. Kiai-kiai kampung terhadap politik memang sangat kurang, terutama tentang politik praktis;
3. Para elit agama cenderung lebih baik berdiam diri, artinya para kiai, tokoh agama dan ulama cenderung berdiam diri (murung) menjadikan satu keselamatan baik individu maupun kelompok (masyarakat).

4. Diperlukan pendampingan kiai-kiai kampung (masjid) agar tidak mudah terjebak dan terombang-ambing oleh pemilu yang selalu menjadi iming-iming pada kenyataannya dan akhirnya banyak demam panggung politik tetapi tidak mampu dikarenakan hanya ikut-ikutan saja.

Politik merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari kekuasaan, sehingga dalam berpolitik dibutuhkan penguasa yang dapat dipercaya oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka, bahwa politik memiliki sistem di dalamnya ada unsur-unsur yang saling berkaitan (*interrelated*) dan saling bergantung (*interdependent*). Sedangkan politik berarti berbagai macam kegiatan suatu Negara yang berkaitan dengan proses menetapkan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut [20].

Hubungan yang kuat antara kiai [21] dan masyarakat di Kabupaten Kediri tampak jelas dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Peran sosial kemasyarakatan kiai-kiai di tengah-tengah kehidupan masyarakat baik menyangkut aspek sosial, politik, kebudayaan maupun yang lebih spesifik adalah bidang keagamaan, paling tidak kiai-kiai adalah sebagai tokoh dan figur di masyarakat [22].

Dalam lingkup masyarakat agraris terdapat hubungan yang erat antara masyarakat dan para kiai. Hal ini terjadi karena biasanya para kiai memiliki identitas yang sama dengan khalayak lingkungannya, umpamanya sebagai petani [23]. Dengan kesamaan tersebut, komunikasi antara kiai dengan masyarakat sekitarnya terjalin dengan akrab. Di sisi lain, kelebihan yang dimiliki kiai sebagai elit religius berpengaruh besar terhadap masyarakat di sekitarnya yang menjadikannya sebagai *key person* dalam komunitas tersebut.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan yang ada di wilayah Kabupaten Kediri tentang permasalahan adanya Urgensi Peran Elit Agama Dalam Panggung Politik

(Analisis Kritis Peran Kiai-kiai Kampung (Masjid) Terhadap Perpolitikan Praktis di Kabupaten Kediri) sebagai subjek dampungan karena ada beberapa alasan antara lain sebagai berikut:

1. Figur kiai dalam dunia politik tidak bisa dipandang sebelah mata, walaupun hanya sebagai pemimpin informal, kiai adalah orang yang diyakini penduduk mempunyai otoritas yang sangat besar dan kharismatik;
2. Kiai dipandang mempunyai kelebihan-kelebihan luar biasa yang membuat kepemimpinannya diakui secara umum. Hal tersebut tentu saja tidak pernah terlepas dari teks-teks keagamaan yang membuat posisi ahli agama (kiai), pada segala kondisi dan situasi, seolah-olah berada di atas manusia lain. Karena kiai kampung berperan sebagai penjaga transmisi pengetahuan agama secara turun-temurun dan sekaligus memegang fungsi kepemimpinan secara simbolik [24];
3. Kiai adalah pewaris para Nabi menegaskan bahwa para kiai adalah orang-orang qualified yang bisa menjawab semua persoalan. Namun ini tidak seluruhnya benar karena ada ungkapan lain yang membedakan antara posisi kiai sebagai pewaris Nabi dan posisi kiai sebagai manusia biasa [25].
4. Hampir semua kiai yang mengasuh sebuah masjid masih dianggap sebagai kelompok yang menghambat perkembangan dan pembangunan masyarakat. Secara politik kiai dianggap naif dan oportunistis, secara administratif kiai dianggap tidak mumpuni dan lemah [26].
5. Kiai di wilayah Kabupaten Kediri belum mengetahui secara maksimal tentang adanya politik

praktis yang sebenarnya dan akhirnya banyak kiai-kiai antusias demam panggung politik.

6. Kelemahan dan kurangnya pemahaman kiai-kiai kampung secara profesional tentang adanya perpolitikan praktis yang menjadikan dampak negative bagi masyarakat [26].

#### **4. Pembahasan**

Dasar kepemimpinan mereka adalah kepercayaan bahwa mereka memiliki suatu hubungan khusus dengan yang Maha Kuasa atau malah mewujudkan karakteristik-karakteristik ilahi tersebut [27]. Sifat ini dipandang dari celah kehidupan santri sebagai satu-satunya karunia kekuasaan yang bersumber dari kekuatan Tuhan. Khasanah riwayat pesantren menggambarkan betapa kuat pengaruh kharisma kyai, mereka menjadi kiblat para pengikutnya. Kebijakan yang seringkali dituangkan secara lisan dijadikan pegangan, sikap dan tingkah-lakunya sehari-hari dijadikan panutan, bahasa kiasan yang dilontarkannya acapkali menjadi bahan renungan. Karena itu mekanisme administrasi pondok pesantren baik yang berkaitan dengan struktur organisasi kepemimpinan maupun arah perkembangan pesantren, tidak lepas dari peranan kyai. Dengan demikian, seringkali visi kyai merupakan barometer pondok pesantren. Begitu besarnya pengaruh kyai pada masyarakat muslim Jawa menggambarkan sebuah fenomena Islam Jawa yang unik dan menarik untuk di dalam.

Berbeda dengan penjelasan di atas mengenai peran dan gambaran kyai pada umumnya, penelitian ini mengangkat “kyai kampung” yang menjadi objek penelitian. Kyai kampung adalah fugur agama Islam di desa-desa (baca; kampung) yang cenderung tidak memiliki pesantren yang besar. Kyai kampung memainkan perannya sebagai tokoh agama Islam lokal yang secara umum memiliki masjid atau surau, melakukan dakwah

secara local (hanya lingkungan sekitar/desanya) dan terjun langsung dalam sisi-sisi kehidupan masyarakat desa. Kyai kampung biasanya aktif mendampingi proses pemahaman masyarakat Islam di desa dengan hadir dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial warga desa meliputi; *slamatan*, mengimami tahlilan, pengisi majelis ta'lim, menjadi imam dan khotib dan lain sebagainya.

Pengambilan objek penelitian “kyai kampung” di wilayah kabupaten Kediri memiliki alasan yang logis. Alasan yang paling mendasar pemilihan objek kabupaten Kediri antara lain; pertama, Kediri merupakan Kabupaten yang memiliki ratusan pesantren dan basis muslim tradisional. Kedua, meskipun Kab. Kediri merupakan wilayah basis santri, kyai dan pesantren, tetapi masyarakat muslim di sana cenderung toleran dan menghargai perbedaan keyakinan (bahkan masih banyak desa di kabupaten Kediri yang penduduknya multi-religious; Hindu, Katolik, aliran Kebatinan dan protestan) [28].

Hubungan yang kuat antara ulama (kyai) [29] dan umat Islam tampak jelas dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Islam. Peran sosial kemasyarakatan ulama (kyai) di tengah-tengah kehidupan masyarakat baik menyangkut aspek sosial, politik, kebudayaan maupun yang lebih spesifik adalah bidang keagamaan, paling tidak telah menjadikan kyai sebagai sosok dan figur terpandang dalam masyarakat [30]. Penjelasan mengenai kyai antara lain adalah:

Istilah Kiai bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa [31]. Kata Kiai mempunyai makna yang agung, keramat, dan dituahkan. Selain gelar Kiai diberikan kepada seorang laki-laki yang lanjut usia, arif, dan dihormati di Jawa. Gelar Kiai juga diberikan untuk benda-benda yang keramat dan dituahkan, seperti keris dan tombak.

Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku [32].

Dalam lingkup masyarakat agraris terdapat hubungan yang erat antara masyarakat dan para ulama (kiai). Hal ini terjadi karena biasanya para ulama (kiai) memiliki identitas yang sama dengan khalayak lingkungannya, umpamanya sebagai petani [33]. Dengan kesamaan tersebut, komunikasi antara kiai dengan masyarakat sekitarnya terjalin dengan akrab. Di sisi lain, kelebihan yang dimiliki kiai sebagai elit religius berpengaruh besar terhadap masyarakat di sekitarnya yang menjadikannya sebagai key person dalam komunitas tersebut.

Dalam berbagai pembahasan dan realita lapangan yang ada, kiai memang biasanya akrab sebagai pemimpin (pengasuh) pondok pesantren atau paling tidak kiai adalah pemilik dan sekaligus pengelola kegiatan belajar-mengajar di suatu lembaga pendidikan Madrasah diniyah [34]. Kiai dan pesantren yang merupakan kesatuan yang melekat. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam mapan dan juga lembaga yang masih berperan aktif membina sosio-budaya bangsa, terutama untuk mereka yang dididik di dalamnya. Sampai saat ini lembaga tersebut masih menunjukkan kemampuannya untuk memelihara nilai-nilai luhur ajaran Islam, sehingga menjadi modal utama yang sangat penting bagi pesantren [35].

Sistem belajar sambil berbuat sejak fajar terbit sampai larut malam merupakan cara kerja orang pesantren. Adanya ciri-ciri kesederhanaan, persaudaraan

yang akrab, keikhlasan, kemandirian, kegotongroyongan, jauh dari ketamakan dan mementingkan diri sendiri (egoisme) dan lain-lain adalah produk dari pembentukan kepribadian dalam pendidikan di pesantren. Dunia pesantren dan kharisma kiai merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji, sebab bagaimanapun keberadaannya memiliki tempat tersendiri dalam masyarakat. Tidak disangkal lagi, khususnya bagi masyarakat Jawa, pondok pesantren dengan segala atributnya pernah menduduki posisi strategis. Pesantren mendapat pijakan sangat besar dan mampu menembus dinding kehidupan.

Popularitas pondok pesantren bahkan dimitoskan oleh kharisma kiai dan dukungan santri yang tersebar di tengah kehidupan masyarakat. Corak kehidupan kiai dan santri yang demikian besar membuat pesantren berfungsi multi dimensi, kiai tidak hanya berperan sebagai imam bidang *ubudiah* dan ritual upacara keagamaan, namun sering pula diminta kehadirannya untuk menyelesaikan perkara atau kesulitan yang menimpa masyarakat. Seorang kiai misalnya, tidak jarang diminta mengobati orang sakit, memberi serangkaian ceramah bahkan dimintakan doa untuk keselamatan mereka. Dengan demikian, peran kiai semakin mengakar di masyarakat ketika kehadirannya diyakini membawa berkah.

Meskipun kiai sering dikonotasikan sebagai kelompok tradisional, keberadaannya ternyata tidak dapat digantikan oleh tokoh non formal lainnya. Peranannya sebagai figur sentral merupakan fakta yang tidak perlu dipungkiri, khususnya di kalangan Nahdhiyyin. Bahkan visi dan misi keilmuan kiai dalam suatu pesantren beserta kualitas santrinya menjadi salah satu barometer penilaian masyarakat terhadapnya [36]. Sedemikian kuat tipologi kiai dengan pesantrennya, sehingga transmisi dan pengembangan keilmuan dalam suatu pesantren kadang terlalu sulit dipisahkan dari tradisi keilmuan yang pernah diwariskan kiai pendahulu yang pernah menjadi gurunya. Kharisma kiai yang

memperoleh dukungan dan kedudukan di tengah kehidupan masyarakat terletak pada kemantapan sikap dan kualitas yang dimilikinya, sehingga melahirkan etika kepribadian penuh daya tarik. Proses ini bermula dari kalangan terdekat kemudian mampu menjalar ke tempat berjauhan. Akan tetapi kiai tidak hanya dikategorikan sebagai elit agama [37].

Dalam konteks kehidupan pesantren, kiai juga menyanggah sebutan elit pesantren yang memiliki otoritas tinggi dalam menyimpan dan menyebarkan pengetahuan keagamaan. Kiai ikut mewarnai corak dan bentuk kepemimpinan yang berlaku di pondok pesantren. Kharisma yang melekat pada dirinya tidak jarang dijadikan tolok ukur utama kewibawaan pokok pesantren. Dalam konteks ini meminjam pemikiran Weber yang menggambarkan pemimpin-pemimpin agama yang berkharismatik.

Bukan rahasia lagi, setelah Reformasi bergulir tidak sedikit kiai yang tadinya hidup bertapa, khusyuk, damai dan tenteram dalam masyarakat menjadi sebuah haluan, menyebrangi dunia baru yang bernama politik praktis. Akibatnya muncul kabar angin yang menyeruak ke ruang publik bahwa beberapa kiai telah menggunakan agama sebagai kendaraan untuk main-main dengan kekuasaan dan mengegolkan kepentingan dirinya. Tentu saja kabar yang tidak seluruhnya benar dan dibesar-besarkan tersebut sangat merugikan para kiai dan membuat prihatin umat Islam [38].

Oleh karena itu, kondisi dampungan di masyarakat pada saat ini adalah ada 26 Kecamatan di Kabupaten Kediri, yaitu ; 1. Kec. Badas, 2. Banyakan, 3. Gampengrejo, 4. Grogol, 5. Gurah, 6. Kandangan, 7. Kandat, 8. Kayen Kidul, 9. Kepung, 10. Kras, 11. Kunjang, 12. Mojo, 13. Ngadiluwih, 14. Ngancar, 15. Ngasem, 16. Pagu, 17. Papar, 18. Pare, 19. Plemahan, 20. Plosoklaten, 21. Puncu, 22. Purwoasri, 23. Ringinrejo, 24. Semen, 25. Tarokan dan 26. Wates.

Maka dengan kondisi dampungan yang ada bahwa di kalangan umat Islam, salah satu diantaranya kiai adalah salah satu entitas elit yang mempunyai kedudukan terhormat, karena di anggap sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas, mendalam dan makhluk linuwih. Kiai juga dipandang sebagai sosok pewaris Nabi sehingga kiai menjadi sumber legitimasi baik dalam domain agama maupun sosial politik [39].

Dengan demikian, melihat fenomena pada saat sekarang bahwa Urgensi Peran Elit Agama Dalam Panggung Politik (Analisis Kritis Peran Kiai-kiai Kampung (Masjid) Terhadap Perpolitikan Praktis di Kabupaten Kediri) adalah sebagai berikut ;

1. Kiai-kiai Kampung (Masjid) di Kabupaten Kediri sangat krisis perpolitikan yang mana para kiai bias terombang ambingkan oleh adanya pemilihan umum (pemilu), dikarenakan para kiai mempunyai figure yang tidak sama, sehingga inilah menyebabkan demam dipanggung politik;
2. Banyaknya Kiai-kiai Kampung (Masjid) yang ada di Kabupaten Kediri yang menjadi jurkam pemilu di tingkat daerah maupun pusat baik pilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum (DPR);
3. Kesempatan bagi Kiai-kiai Kampung (Masjid) yang mampu memanfaatkan momen tersebut sebagai ajang kebutuhan pribadi maupun kelompok yang penting dapat uang dan lain-lain.

Dalam lingkup masyarakat agraris terdapat hubungan yang erat antara masyarakat dan para ulama (kiai). Hal ini terjadi karena biasanya para ulama (kiai) memiliki identitas yang sama dengan khalayak lingkungannya, umpamanya sebagai petani [40]. Dengan kesamaan tersebut, komunikasi antara kiai dengan masyarakat sekitarnya terjalin dengan akrab. Di sisi lain, kelebihan yang dimiliki kiai sebagai elit religius berpengaruh besar terhadap masyarakat di sekitarnya

yang menjadikannya sebagai *key person* dalam komunitas tersebut.

Maka dari berbagai pembahasan dan realita lapangan yang ada, kiai memang biasanya akrab sebagai pemimpin (pengasuh) pondok pesantren atau paling tidak kiai adalah pemilik dan sekaligus pengelola kegiatan belajar-mengajar di suatu lembaga pendidikan Madrasah diniyah [41]. Kiai dan pesantren yang merupakan kesatuan yang melekat. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam mapan dan juga lembaga yang masih berperan aktif membina sosio-budaya bangsa, terutama untuk mereka yang dididik di dalamnya. Sampai saat ini lembaga tersebut masih menunjukkan kemampuannya untuk memelihara nilai-nilai luhur ajaran Islam, sehingga menjadi modal utama yang sangat penting bagi pesantren [42].

Dalam dunia pendidikan bahwa Urgensi Peran Elit Agama Dalam Panggung Politik (Analisis Kritis Peran Kiai-kiai Kampung (masjid) Terhadap Perpolitikan Praktis di Kabupaten Kediri) sangat dibutuhkan agar dapat menjadikan tolak ukur. Maka yang terpenting adalah sebagai berikut ;

1. Kiai-kiai kampung (masjid) yang ada di wilayah Kabupaten Kediri akan lebih berhati-hati adanya politik praktis yang membawa dampak negative bagi masyarakat secara umum;
2. Kiai-kiai kampung (masjid) yang ada di wilayah Kabupaten Kediri akan lebih profesional dan selektif terhadap siapapun yang minta bantuan menjadi jurkam atau demam panggung;
3. Kiai-kiai kampung (masjid) yang ada di wilayah Kabupaten Kediri jangan sampai tergiur adanya money politik, karena kiai sebagai figur masyarakat;
4. Kiai-kiai kampung (masjid) yang ada di wilayah Kabupaten Kediri jangan sampai memihak salah

satu paslon dan cawan yang ada karena akan menjadi sorotan masyarakat;

5. Kiai-kiai kampung (masjid) yang ada di wilayah Kabupaten Kediri harus sebagai uswatun hasanah bagi masyarakat yang akhirnya masjid bias berfungsi secara maksimal [43].

Dari beberapa hasil pembahasan diatas, bahwa kiai-kiai kampung (masjid) mempunyai peran yang sangat penting, yaitu mewujudkan kepada masyarakat agar mampu menghadapi tantangan zaman adanya pengaruh politik yang berkembang. Sehingga Urgensi Peran Elit Agama Dalam Panggung Politik (Analisis Kritis Peran Kiai-kiai Kampung (masjid) Terhadap Perpolitikan Praktis di Kabupaten Kediri) perlu membentuk FGD, antara lain sebagai berikut ;

1. Bahwa untuk henjalin hubungan dan kerjasama yang postif antara kiai satu dengan kiai lainnya yang di Wilayah Kabupaten Kediri diperlukan untuk mewujudkan masyarakat kondusif, aman dan damai walaupun beda pendapat;
2. Perlu adanya brifing atau pertemuan Kiai-kiai Kampung (masjid) di Wilayah Kabupaten Kediri tentang adanya perpolitikan yang sifatnya umum, agar para kiai tidak terjebak adanya politik praktis;
3. Forum group discussion (FGD) sebagai wadah silaturahmi Kiai-kiai Kampung (masjid) yang ada di Wilayah Kabupaten Kediri untuk menjalin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan umat Islam agar tidak pecah belah.

## 5. Kesimpulan

Sebagai penerapan strategi tersebut diatas, diperlukan Kiai adalah agen perubahan yang sangat potensial, terutama dalam menjembatani kemauan

pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Mereka selain menjadi individu yang merdeka juga berperan sebagai *shadow player* untuk mempengaruhi kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat ketika kandidat yang didukungnya dalam posisi menang. Dalam aktivitas kiai, misalnya, pandangan Kiai dalam aktivitas politiknya, adalah memperjuangkan kepentingan dan sebagai kemaslahatan umat melalui kekuasaan.<sup>10</sup>

Maka untuk memberikan kontribusi tentang adanya Urgensi Peran Elit Agama Dalam Panggung Politik (Analisis Kritis Peran Kiai-kiai Kampung (masjid) Terhadap Perpolitikan Praktis di Kabupaten Kediri), urgensi kiai-kiai kampung (masjid) agar dapat memberikan motivasi dan contoh yang baik terhadap masyarakat agar tidak terjebak yang namanya politik praktis. Perannya kiai-kiai kampung (masjid) yang ada di di Wilayah Kabupaten Kediri sangat urgen terkait adanya politik praktis. Urgen kiai-kiai kampung (masjid) sebagai perwakilan tiap kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Kediri yang dapat memberikan sumber informasi tentang adanya kiai-kiai yang demam panggung politik.

## 6. Referensi

- [1] Schmitter, Philippe C. 1986. *Transitions From Authoritarian Rule; Tentative Conclusions About Unacertain Democracies*. Baltimore; John Hopkins University Press Lihat Juga Amal, Ikhlasul. 2003. Upaya Melembagakan Etika Politik Memerlukan Transparansi Seluas-luasnya. *Media Inovasi*, 12 (2) pp. 30.
- [2] Hajar, Ibnu. 2009. *Kiai Di Tengah Pusaran Politik*. IRCiSoD. pp. 20.
- [3] Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. The University of Chicago, pp. 8.
- [4] Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. LP3ES. pp. viii.

- [5] Farid, Miftah. Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia. *Jurnal Sositeknologi*, 11 (6), 2009.
- [6] Nuha, Ulin. *Peran Politik Kiai Dalam Proses Politik Di Partai Politik*(Studi Kasus Peran KH. A. Haris Shodaqoh di Partai Persatuan Pembangunan).
- [7] Turmudi, Endang. 2003. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. LKiS. pp. 246
- [8] Ummatin, Khoiro. 2002. *Perilaku Politik Kiai*. Pustaka Pelajar. pp. 116.
- [9] Subiyakto, Rudi. Panggung Politik Kiai di Era Pemilukada, **Error! Hyperlink reference not valid.**
- [10] Nasir, M. Ridlwan. 2005. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*. Pustaka Pelajar. pp. 327.
- [11] Ibid.
- [12] Rudi Subiyakto, *Panggung Politik Kiai di Era Pemilukada*.
- [13] Keberadaan kiai kampung merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan politik yang sedang dibangun bangsa ini. Istilah kiai kampung' adalah kata yang digunakan untuk menunjuk salah satu dari dua macam kiai yang ada dalam masyarakat kita, selain ada kiai sepuh dan sebangsanya, yaitu mereka yang menjadi pengasuh pesantren-pesantren besar seperti Lirboyo, Langitan, Tebuireng dan sebagainya. Kiai kampung seringkali dihadapkan kepada keharusan' menghadapi penilaian-penilaian oleh kiai-kiai di level lebih atas tentang keadaan yang dihadapi. Tetapi mereka juga harus mendengarkan pendapat orang-orang pinggiran, rakyat kecil, maupun pihak-pihak lain yang tidak masuk ke lingkaran kekuasaan. Dalam suasana adanya keadaan-keadaan yang saling bertentangan itu, kiai kampung lebih sering mendengar pendapat mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan itu. Sudah tentu ini merupakan pola hubungan timbal balik yang sehat antara para kiai kampung dan rakyat yang mereka pimpin.
- [14] Peneliti, *Wawancara*, Kediri, 31 Juli 2018. Bahwa pada prinsip bahwa kiai-kiai kampung (masjid) kesulitan mencari panutan kepada ulama-ulama yang mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat, karena para ulama/masyayikh mempunyai kepentingan-kepentingan yang tidak sama. Sehingga level kiai-kiai kampung (masjid) tidak punya prinsip harus memilih

kepada siapa yang mereka ikuti, pada kenyataannya yang penting nyoblos walaupun tidak cocok dengan kata hatinya.

- [15] Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit, Suatu Bahasan Pengantar*. PLOD Universitas Gajah Mada. pp. 63.
- [16] Ambardi, Kuskridho. 2009. *Mengungkap Politik Kartel: studi tentang sistem kepartaian diIndonesia era reformasi*. KPG (keputusan populer Gramedia). pp. 19.
- [17] Ali Maksum, 2009. *Pengantar filsafat: dari masa klasik hingga post-modernisme*. Ar-Ruzz. p. 12.
- [18] Dimensi politik menurut filsuf terkenal Yunani, suatu keberadaan manusia merupakan dimensi yang sangat fundamental. Sebab, hal tersebut mempengaruhi lingkungan lain dalam kehidupan manusia tersebut. Hampir semua studi tentang kiai yang dilakukan para sarjana asing maupun dalam negeri terfokus pada kiai-kiai pesantren atau Nahdlatul Ulama (NU) secara umum. Masih jarang ditemui studi yang secara khusus membahas peran kiai kampung, kiai yang mengasuh sebuah mushalla atau langgar, atau masjid. Penting dicatat disini bahwa studi-studi tentang kiai pesantren itupun dikatakan sangat terlambat, karena baru marak pasca 1980-an. Sebelum dasawarsa itu, kiai merupakan elit yang tidak diminati oleh para akademisi karena dianggap sebagai kelompok yang menghambat perkembangan dan pembangunan masyarakat. Secara politik kiai dianggap naif dan oportunistis, secara administratif kiai dianggap tidak mumpuni dan lemah. Para ahli lebih tertarik dengan tokoh-tokoh dan gerakan-modern dalam Islam seperti Muhammadiyah dan Masyumi.
- [19] Mas'ood, Mohtar. 1989. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Gramedia. pp. 45.
- [20] Philipus, Ng. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Raja Grafindo Persada. pp.104.
- [21] Ciri yang paling esensial bagi suatu pesantren adalah adanya seorang *kyai* (Jawa) atau *ajengan* (Sunda). *Kyai / Ajengan* pada hakekatnya adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai ilmu di bidang agama dalam konteks ini agama Islam. Ia merupakan pelopor bagi kelahiran pesantren yang dipimpinnya dan menjadi pemegang serta penentu kebijakan yang

ada di seluruh pesantren. Lihat Fadhilah, Amir. 2011. Struktur dan Pola Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren di Jawa. *Hunafa*, 8 (1) pp. 101-120. Namun pengertian paling luas di Indonesia, sebutan Kyai dimaksudkan untuk para pendiri dan pemimpin pesantren, yang sebagai muslim terhormat telah membaktikan hidupnya untuk Allah SWT serta menyebarkan dan memperdalam ajaran-ajaran serta pandangan Islam melalui pendidikan. Kyai berkedudukan sebagai tokoh sentral dalam tata kehidupan pesantren, sekaligus sebagai pemimpin pesantren. Dalam kedudukan ini nilai kepesantrenannya banyak tergantung pada kepribadian Kyai sebagai suri teladan dan sekaligus pemegang kebijaksanaan mutlak dalam tata nilai pesantren. Dalam hal ini M. Habib Chirzin mengatakan bahwa peran kyai sangat besar sekali dalam bidang penanganan iman, bimbingan amaliyah, penyebaran dan pewarisan ilmu, pembinaan akhlak, pendidikan beramal, dan memimpin serta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh santri dan masyarakat.

- [22] Fadhilah, Amir. Struktur dan Pola Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren di Jawa. pp. 20.
- [23] Kartodirdjo, Sartono. 1974. *Kepemimpinan dalam Sejarah Indonesia*. BPA UGM.
- [24] Latif, Bustami. 2009. *Kiai Politik, Politik Kiai*. Pustaka Bayan. pp. 43.
- [25] Bakri, Umar. 1938. *Al-Hadits As-Shohihah*. As Sa'diyah. pp. 8.
- [26] Pengabd, *Wawancara*, Kediri, Agustus 2018. Waktu FGD dengan salah satu kiai yang hadir dalam acara, memang masih banyak kiai-kiai yang buta politik.
- [27] Fadhilah, Amir. Struktur dan Pola Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren di Jawa. pp. 21.
- [28] Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2015, persentase agama penduduk Kabupaten Kediri adalah Islam 93.62%, Kristen Protestan 2.68%, Hindu 2.56%, Katolik 1.03% dan Budha 0.11% Lihat: "Kabupaten Kediri Dalam Angka 2016", diakses 07 Agustus 2017.
- [29] Fadhilah, Amir. 2011. Struktur dan Pola Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren di Jawa. *Hunafa*, 8 (1) pp. 101-120.

- [30] Fadhilah, Amir. *Struktur dan Pola Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren di Jawa*. pp. 20.
- [31] Ziemek, Manfred. 1986. pp. 130.
- [32] Dhofier, Zamakhsyari. 1983. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. LP3S. pp. 18.
- [33] Kartodirdjo, Sartono. 1974. *Kepemimpinan dalam Sejarah Indonesia*. BPA UGM.
- [34] Madjid, Nurcholis. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*. Paramadina. pp. 5.
- [35] Fadhilah, Amir. 2011. Struktur dan Pola Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren di Jawa. *Hunafa*, 8 (1) pp. 101-120.
- [36] Suwito. 2001. "Jaringan Intelektual Kyai Pesantren di Jawa-Madura Abad XX", dalam Khaeroni dkk (Eds.), *Islam dan Hegemoni Sosial* (Jakarta: Proyek Pengembangan Penelitian pada Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, pp.129.
- [37] Sukanto. 1997. *Kepemimpinan dan Struktur Kekuasaan Kyai: Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang*. *Prisma*, 4.
- [38] Sutarto, Ayu. 2008. *Menjadi NU menjadi Indonesia*. Khalista. pp. 1.
- [39] Kiswanto, Heri. 2008. *Gagalnya Peranan Politik Kiai Dalam Mengatasi KrlsisMulti Dimensional*. Nawasae Press. pp. 30.
- [40] Kartodirdjo, Sartono. 1974. *Kepemimpinan dalam Sejarah Indonesia*. BPA UGM.
- [41] Madjid, Nurcholis. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*. Paramadina. pp. 5.
- [42] Fadhilah, Amir. 2011. Struktur dan Pola Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren di Jawa. *Hunafa*, 8 (1) pp. 101-120.
- [43] Pengabdi, *Wawancara*, Kediri, September 2018.